

ISLAM DAN POLITIK (Telaah atas Pemikiran Politik Kontemporer di Indonesia)

Usman

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar

Abstract

This paper deals with the study of one aspect of political thought in Indonesia. The principal issue is how the synthesis between religion and state in Islamic political thought, especially if the issue is seen from the context of Indonesianness. This problem is seen through a substantive approach and is discussed using content analysis.

From the literature review related to the political thinking of the figures it is concluded that religion and state are complementary and integralistic, in which religion becomes the spirit of the state, or to distinguish secular political thought in the West, the Indonesian political thinking is in a closer spectrum to Central axis or "middle way". While secular thought far enough away from the axis or middle way.

The dynamics of political thought in Indonesia do not physically adopt the basic assumptions on modern politics that are trand in the West but adopt from religious and cultural values encapsulated in Pancasila democracy. And therefore the state of Indonesia is neither a religious state nor a secular state, but a country in which religious values can live and thrive.

Keywords:

Islam, Politics, Contemporary

Abstrak

Tulisan ini berkaitan dengan studi salah satu aspek dari pemikiran politik di Indonesia. Pokok permasalahan adalah bagaimana sintesis antara agama dan negara dalam pemikiran politik Islam, khususnya jika masalah ini dilihat dari konteks keindonesiaan. Masalah ini dilihat melalui pendekatan substantive dan dibahas dengan menggunakan content analysis.

Dari kajian literatur yang berkaitan dengan pemikiran politik tokoh-tokoh tersebut disimpulkan bahwa agama dan negara berhubungan secara komplementer dan integralistik, di mana agama menjadi roh negara, atau untuk membedakan pemikiran politik sekuler di Barat, maka pemikiran politik Indonesia berada pada spectrum yang lebih dekat dengan poros tengah atau "jalan tengah". Sedangkan

pemikiran sekuler cukup jauh dari poros atau jalan tengah. Dinamika pemikiran politik di Indonesia tidaklah mengadopsi secara dokmatis asumsi-asumsi dasar pada perpolitikan modern yang menjadi trand di Barat tetapi mengadopsi dari nilai-nilai agama dan budaya yang terangkum dalam demokrasi pancasila. Dan oleh karena itu negara Indonesia bukanlah negara agama dan bukan pula negara sekuler, tetapi negara yang di dalamnya nilai-nilai agama bisa hidup dan berkembang.

Kata Kunci:

Islam, Politik, Kontemporer

I. Pendahuluan

Perbincangan mengenai Islam dan politik atau agama dan negara memang merupakan tema yang cukup menarik dan tak pernah basi untuk dibicarakan, terutama setelah berkembangnya pemikiran politik sekular di dunia Islam termasuk di Indonesia. Perbincangan ini semakin mengemuka setelah penghapusan sistem kekhilafahan Turki Usmani oleh Mustafa Kemal al-Tattur pada tanggal 3 Maret 1924 dan diikuti dengan pencabutan Islam sebagai agama resmi negara serta penghapusan syari'at sebagai sumber hukum tertinggi negara.

Pemisahan agama dan negara (sekularisme) yang dilakoni Mustafa Kemal di Istambul merupakan sebuah perwujudan atas keinginan yang kuat untuk mengikuti dan mengadopsi pemikiran politik sekuler dari Barat dengan *grand theory* utamanya Max Weber. Sekularisme menjadi sesuatu yang dianggap baik oleh Barat karena secara histories ia terlahir dari perlawanan atas kejumudan pemikiran gereja pada abad pertengahan.

Di Indonesia, agama dan negara masih bersifat broblematis. Persoalan ini berpusat dan berakar pada bagaimana “menghadirkan” peran Islam dalam lingkup negara bangsa atau *netion state*. Ketika konstituante berupaya menyusun UUD yang baru, persoalan pilihan muncul: Pancasila atau Islam. Dan tarik menarik kepentingan politik yang demikian kuat dari golongan nasionalis sekuler dan nasionalis Islam tersebut, Akhirnya terjadilah kompromi politik dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden yang menetapkan kembali ke UUD 1945. Begitupun ketika masa Orde Baru, Islam – terutama di masa-masa awal Orde Baru – dalam taraf tertentu, identik dengan ekstrim kanan, oposisi, anti-Pancasila, dan lain-lain sejenisnya. Kesan seperti ini muncul lagi, di masa Orde Kabinet Kerja, Jokowi-dodo sekarang ini.

Tesis di atas merupakan sebuah realitas emperis yang menjelaskan bahwa terdapat ketidak mampuan untuk mendialogkan visi sekuler dengan visi yang menginginkan warna agama dalam dasar negara sehingga negara dalam realitas politik terkadang melakukan penyimpangan dari etika dan moralitas agama.

Perkembangan mutakhir politik Indonesia menunjukkan bahwa agama merupakan suatu institusi politik yang paling penting dalam sistem pancasila.